

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH,  
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI JAWA TENGAH**

**Skripsi**  
**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**  
**Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**  
**Dwi Mikta Anggun Prastiwi**  
**NIM : 31402400033**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**SEMARANG**  
**2025**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH,  
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh :  
**Dwi Mikta Anggun Prastiwi**  
NIM : 31402400033

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Agustus 2025  
Dosen Pembimbing,

**Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA**

NIK. 211414026

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH**

**Disusun Oleh :**

**Dwi Mikta Anggun Prastiwi**

**NIM : 31402400033**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan  
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program  
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Agustus 2025

Ketua Program Studi,



Dosen Pembimbing,

**Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., PhD**  
NIK. 211403012

**Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIK. 211414026

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Mikta Anggun Prastiwi

NIM : 31402400033

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Di Pemerintah Jawa Tengah”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Dwi Mikta Anggun Prastiwi  
NIM. 31402400033

## ABSTRAK

### **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Jawa Tengah”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah periode 2020-2024. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga PAD belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan terbalik, yang menandakan pengelolaan keuangan daerah kurang sehat. Hal tersebut terjadi kemungkinan oleh target PAD yang ditetapkan terlalu rendah, sehingga meskipun tercapai, kontribusinya terhadap pembiayaan daerah tetap kecil. Sementara itu, belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja yang baik dan tepat sasaran berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah lebih dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan belanja daerah dibandingkan kemandirian dan efektivitas PAD. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat strategi diversifikasi sumber PAD dan menjaga efektivitas pengelolaannya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel dan periode penelitian sehingga lebih memberikan gambaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah

Kata kunci: Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.

## **ABSTRACT**

### ***“The Influence of Regional Independence, Effectiveness of Regional Original Income and Regional Expenditure on Financial Performance in the Central Java Government”***

*This study aims to examine the influence of regional independence, the effectiveness of Local Own-Source Revenue (PAD), and regional expenditure on the financial performance of local governments in Central Java. This research is quantitative and utilizes secondary data obtained from budget realization reports from district and city governments in Central Java for the 2020-2024 period. Data analysis used multiple linear regression analysis with the aid of SPSS software. The results show that regional independence does not have a significant effect on financial performance. This indicates that local governments are still dependent on the central government, and PAD has not yet become the main source of regional financing. The effectiveness of PAD has a negative and significant effect on financial performance. This reflects an inverse relationship, indicating unhealthy financial management. One possible reason is the relatively low PAD targets set by the local government, which appear effective when achieved but provide only a small contribution to regional financing. Meanwhile, regional expenditure has a positive and significant effect on financial performance. This finding suggests that effective and well-targeted expenditure management plays an important role in improving financial performance. Therefore, the financial performance of local governments in Central Java is more strongly influenced by the effectiveness of regional expenditure management than by regional independence or PAD effectiveness. The results of this study suggest that local governments need to strengthen their strategies for diversifying local revenue sources and maintaining effective management. Furthermore, future research could expand the variables and study period to provide a more comprehensive picture of local government financial performance in Central Java.*

**Keywords:** *Regional Independence, PAD Effectiveness, Regional Expenditure, Local Government Financial Performance.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Jawa Tengah”**.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.

5. Kepada orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Keluarga Sub Bagian Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang selalu memberikan semangat, waktu, dukungan, bantuan dan do'a selama ini.
7. Terimakasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi 2024 yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Agustus 2025

Penulis,



Dwi Mikta Anggun Prastiwi  
NIM. 31402400033



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	14
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	14
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	20
1.4 Tujuan Penelitian .....	20
1.5 Manfaat Penelitian .....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	23
2.1 Landasan Teori .....	23
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	23
2.1.2 Kinerja Pemerintah Daerah .....	23
2.1.3 Kemandirian Daerah .....	26
2.1.4. Efektivitas PAD .....	27
2.1.5 Belanja Daerah .....	29
2.2. Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	34
2.3.1 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ....	34
2.3.2 Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah .....	35
2.3.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah .....	36
2.4. Kerangka Konseptual .....	37
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN .....	38

3.1	Jenis Penelitian.....	38
3.2	Populasi Dan Sampel Penelitian .....	38
3.2.1	Populasi Penelitian .....	38
3.2.2	Sampel Penelitian .....	39
3.3	Sumber dan Jenis Data .....	39
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	40
3.5	Variabel dan Indikator .....	40
3.5.1	Variabel Independen (Y) .....	40
3.5.2	Variabel Dependen (X) .....	42
3.6	Teknis Analisis Data .....	43
3.6.1	Statistik Deskriptif .....	43
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.4	Uji Kesesuaian Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ) .....	46
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	49
4.2	Analisis Data .....	49
4.2.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	49
4.2.2	Uji Asumsi Klasik .....	52
4.2.3	Uji Kesesuaian Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ).....	59
4.2.4	Pengujian Hipotesis .....	61
4.3	Pembahasan hasil penelitian .....	62
4.3.1	Hubungan kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah.....	62
4.3.2	Hubungan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan daerah.....	64
4.3.3	Hubungan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah .....	65
BAB V PENUTUP .....		67
5.1	Simpulan .....	67
5.2	Implikasi.....	68
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	69
5.4	Agenda Penelitian Mendatang .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....		70
LAMPIRAN.....		72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	26
Tabel 2. 2 Kriteria Kemandirian Daerah.....	27
Tabel 2. 3 Kriteria Efektivitas PAD.....	29
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif (1).....	50
Tabel 3. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif (2).....	50
Tabel 3. 3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (1) .....	52
Tabel 3. 4 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (2) .....	53
Tabel 3. 5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	55
Tabel 3. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Gletser.....	56
Tabel 3. 7 Hasil Uji Autokolerasi .....	58
Tabel 3. 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
Tabel 3. 9 Hasil Uji F.....	60
Tabel 3. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	60
Tabel 3. 11 Hasil Uji T .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Rasio Efisiensi di Jawa Tengah 2020 s.d. 2024 .....	16
Gambar 1. 2 Grafik Rasio Kemandirian Daerah di Jawa Tengah 2020 s.d. 2024 .....	18
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	37
Gambar 3. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot.....	54
Gambar 3. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram .....	54
Gambar 3. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Grafik <i>Scatterplot</i> .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel Nama Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2020-2024 .....	72
Lampiran 2. Data Sampel Penelitian .....	73
Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel Penelitian.....	81



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang penyelenggaraannya dilakukan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan mengenai pemerintah daerah tersebut mengalami banyak perubahan dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah hingga terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah diartikan sebagai kepala daerah yang memiliki peran sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dalam tugas kepemimpinan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi (Marsono, 2005).

Pemerintah daerah yang berada di Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peranan dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Namun dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah sendiri sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan tujuan dan potensi daerah. Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022) berpendapat bahwa otonomi daerah akan berjalan dengan baik ketika pemerintah dapat dengan cepat dan tepat mengidentifikasi sektor-sektor



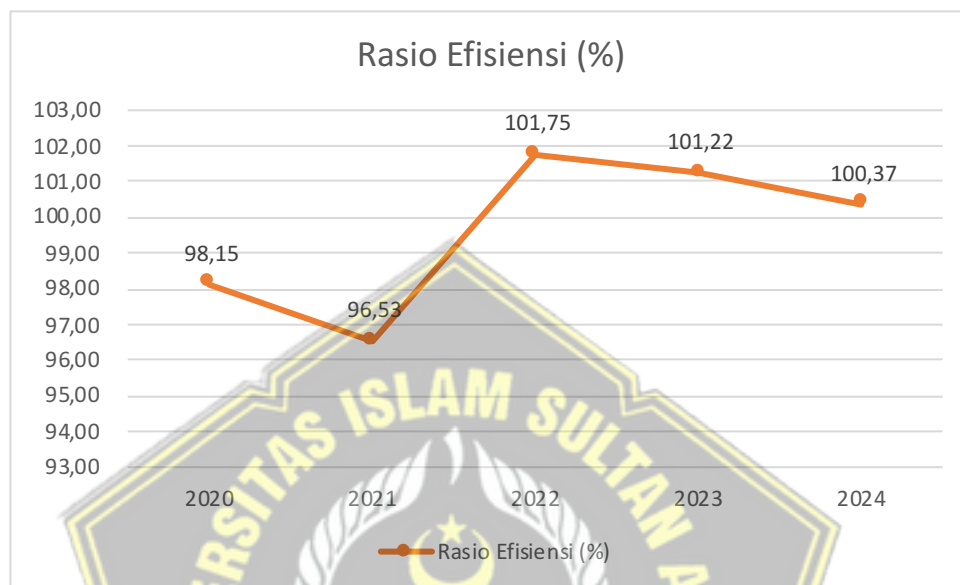
potensial sebagai penggerak pembangunan daerah. Hal tersebut juga sebagai bentuk kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010). Kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban, dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014). Kinerja pemerintah daerah harus dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal mengatur program-program peningkatan keuangan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas persetujuan pemerintah pusat.

Kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan dan belanja daerah yang dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pengeluaran atau belanja terhadap total realisasi pendapatan (Putra, 2022). Rasio efisiensi menunjukkan seberapa efisien pemerintah daerah menggunakan pendapatannya untuk membiayai belanja. Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka kinerja keuangan dikatakan efisien, namun jika rasio yang dihasilkan besar maka kinerja dikatakan tidak efisien (Azhar, 2021). Berikut merupakan grafik

kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2020 s.d. 2024.

Gambar 1. 1 Grafik Rasio Efisiensi di Jawa Tengah 2020 s.d. 2024



Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan data selama periode 2020 s.d. 2024, rasio kinerja keuangan pemerintah daerah di 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah mengalami *trend* yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, rata-rata rasio kinerja keuangan mengalami penurunan dari 98,15% ke 96,53%. Angka di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 101,75% kemudian mengalami penurunan 2023 dan 2024 menjadi 101,22% dan 100,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten dan kota di Jawa Tengah tidak stabil dengan rata-rata kinerja keuangan pemerintah di Jawa Tengah **kurang efisien**.

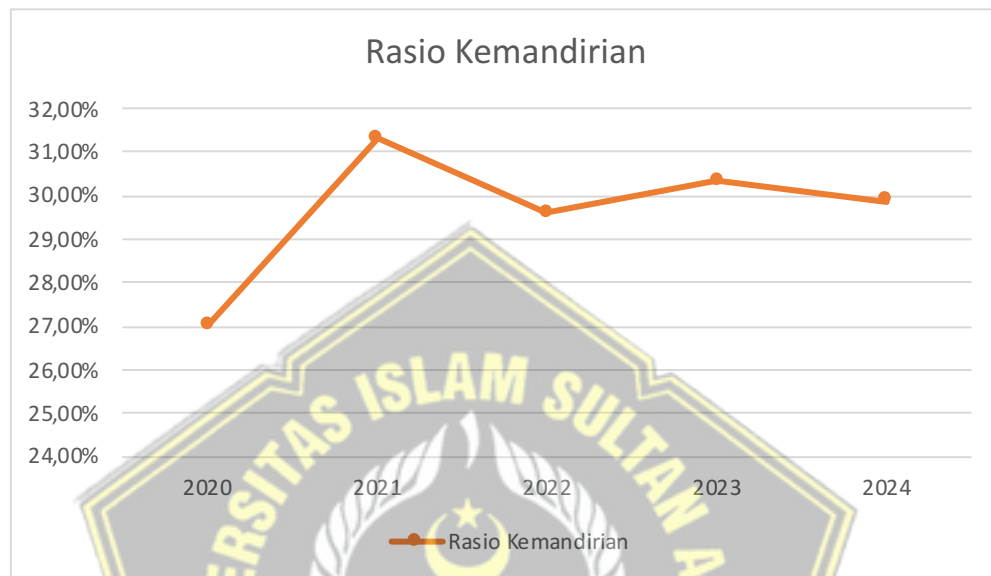
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari indikator kemandirian daerah, yaitu seberapa jauh daerah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat dan provinsi

melalui dana perimbangan. Efektivitas PAD juga memiliki peran dalam kinerja keuangan daerah. Pendapatan asli daerah yang besar belum tentu baik apabila tidak dikelola secara efisien dan digunakan untuk kegiatan yang produktif. Oleh karena itu, efektivitas PAD dilihat dari sejauh mana daerah mampu digunakan secara optimal untuk mendanai pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi. Selain kemandirian daerah, indikator kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa efisien belanja daerah pemerintah. Belanja daerah merupakan instrumen dalam memberikan pelayanan dan pembangunan pemerintah daerah.

Permasalahan terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia antara lain adanya ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat berupa subsidi daerah otonom maupun bantuan pembangunan daerah, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah PAD yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, dan adanya inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan rata-rata nasional saat ini PAD sangat rendah, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih tinggi. Ketergantungan mencakup 80% dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan

daerah hanya sekitar 12,8%. Berikut grafik rata-rata rasio kemandirian daerah di kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada periode 2020 s.d. 2024.

Gambar 1. 2 Grafik Rasio Kemandirian Daerah di Jawa Tengah 2020 s.d. 2024



Sumber data : diolah (2025)

Rasio Kemandirian 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah pada periode 2020 sampai dengan 2024 yang dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah dibagi dana perimbangan dari pemerintah pusat menunjukkan rata-rata sebesar 29,62%. Berdasarkan kriteria kinerja pemerintah daerah dalam Peraturan Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, nilai tersebut **tergolong rendah**.

Penelitian yang dilakukan oleh Anynda, N.S, & Hermanto, S.B. (2020) menunjukkan hasil bahwa Kemandirian daerah, Efektivitas PAD, dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian dari Permatasari, D.A. & Trisnaningsih, S. (2022) juga menunjukkan bahwa Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Daerah, serta Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil

penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024) menunjukkan hasil bahwa variabel Kemandirian Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan pada variabel Belanja Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Rahmalita, A. (2023) menunjukan bahwa Kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemda sedangkan Efektivitas PAD dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda. Penelitian oleh Maryanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023) menunjukan bahwa Kemandirian dan Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu tersebut maka penulis melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Variabel yang digunakan oleh penulis yaitu kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah sebagai variabel independennya. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah dengan objek penelitian Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Populasi penelitian mencakup 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah. Sampel yang akan digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2020- 2024.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kinerja pemerintah daerah adalah pencapaian hasil yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan belanja daerah menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Oleh karena itu penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
- 2) Apakah efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
- 3) Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:



- 1) Menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah.
- 2) Menguji secara empiris pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah.
- 3) Menguji secara empiris pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pengaruh kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah.

Kemudian diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **2) Manfaat Praktis**

- (1) Dari hasil penelitian ini dimaksudkan dapat menambah pengalaman, wawasan dengan membandingkan teori dengan praktik yang terjadi.
- (2) Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar pemerintah untuk bisa mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah.

- (3) Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang selanjutnya dapat dijadikan motivasi dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan kontrak antara pemilik (principal) dan manajer (agent), dimana principal melakukan pendelegasian keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Rahmalita, A. (2023), pemerintah daerah berperan sebagai agen dan pemerintah pusat berperan sebagai principal. Teori Keagenan berpandangan bahwa pemerintah daerah sebagai agen dari pemerintah pusat principal bertindak untuk kepentingan mereka sendiri (Handayani, dkk, 2020).

Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena terdapat kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di pemerintah daerah di Jawa Tengah. Pemerintah pusat tidak dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya sendiri, maka memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri. Kemandirian daerah yang tinggi dan pemerintah daerah mampu mengelola daerah dengan baik, maka diharapkan kinerja keuangan daerah menjadi optimal.

##### **2.1.2 Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja Pemerintah merujuk pada tingkat tercapainya tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab dalam hal pelayanan

publik yang melibatkan indikator hasil, keluaran, dan dampak (Mardiasmo, 2009). Kinerja pemerintah daerah mencerminkan pencapaian hasil yang efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mahmudi, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah hasil dari pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah dievaluasi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Evaluasi Kinerja tersebut mencakup indikator efektivitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian target pembangunan daerah.

Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui beberapa indikator-indikator sebagai berikut.

1. Efektivitas

Mengukur sejauh mana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas juga mencerminkan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. (Mahmudi, 2010; Dwiyanto, 2006)

2. Efisiensi

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya secara optimal dalam mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi mencakup pengelolaan anggaran, tenaga kerja, dan waktu. (Sedarmayanti, 2011)

### 3. Akuntabilitas

Berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga transparansi dan integritas dalam menjalankan programnya. (Dwiyanto, 2006; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)

### 4. Responsivitas

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat. (Osborne & Gaebler, 1992; Dwiyanto, 2006)

### 5. Produktivitas

Mengukur hasil yang dicapai dibandingkan dengan input yang digunakan. Semakin tinggi produktivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja yang baik tercermin dari pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Menurut Dwiyanto (2006) kualitas pelayanan publik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah tentunya harus mencakup kinerja keuangan. Rasio efisiensi digunakan untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efisiensi ini menghitung realisasi pengeluaran atau belanja terhadap total

realisasi pendapatan (Putra,S.A., 2022). Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka kinerja keuangan dikatakan efisien, namun jika rasio yang dihasilkan besar maka kinerja dikatakan tidak efisien (Azhar, 2021). Berikut ini merupakan kriteria dalam mengkategorikan tingkat efisiensi keuangan daerah yaitu:

Tabel 2. 1 Kriteria Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kriteria	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	Diatas 100
Kurang Efisien	90-100
Cukup Efisienn	80-90
Efisien	60-80
Sangat Efisien	Dibawah 60

Sumber : Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### 2.1.3 Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah dalam sektor keuangan dapat diketahui dengan kemampuan daerah dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan belanja modal serta operasional melalui pendapatan asli daerah (Muzaki & Hapsari, 2022).. Daerah dapat disebut mandiri apabila pemerintah daerahnya dapat melaksanakan pembiayaan sendiri dan melayani masyarakat dengan baik melalui pelayanan publik yang telah disediakan melalui sumber pendapatan daerah (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Kemandirian daerah dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yaitu semakin mandiri suatu daerah maka semakin baik kinerjanya karena dinilai mampu memanfaatkan potensi daerahnya dengan optimal (Ramadhan, Kustiawan &



Fitriana, 2022). Dalam upaya menciptakan kemandirian, pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat dan memperbaiki berbagai sektor yang dapat berkembang menjadi sumber pendapatan asli daerah (Anynda & Hermanto, 2020).

Menurut Anyndya & Hermanto (2020), rasio kemandirian daerah dapat dijadikan gambaran dari tergantungnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah, begitu sebaliknya. Rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang sumber lain misal bantuan transfer dari pemerintah pusat maupun pinjaman (Abdeul Halim, 2012).

Tabel 2. 2 Kriteria Kemandirian Daerah

Kriteria	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0 – 25
Rendah	25 – 50
Sedang	50 – 75
Tinggi	75 – 100

Sumber : Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

#### 2.1.4. Efektivitas PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang sah dikelola untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan undang-undang dan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan tujuan dari PAD yaitu memberikan kewenangan pemerintah dalam partisipasi otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah tersebut sebagai bentuk desentralisasi. Semakin banyak PAD disuatu daerah maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pembangunan daerah tersebut (Bilqis & Priyono, 2023). Jumlah pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan daerah menunjukkan seberapa daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahan nasional (Ijtihad & Harsono, 2024).

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari empat yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan menjalankan roda pemerintahan, semakin efektif PAD maka kinerja pemerintah daerah semakin baik yang berarti daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sendiri (Ramadhan, Kustiawan, & Fitriana, 2022). Rasio efektivitas memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana dibanding dengan target yang telah diputuskan sesuai potensi daerah, rasio yang bertambah tinggi berarti semakin efektif (Muzaki & Hapsari, 2022).

Tabel 2. 3 Kriteria Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektif (%)
Sangat Efektif	Diatas 100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	Dibawah 60

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996

#### 2.1.5 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang menimbulkan kurangnya ekuitas dana sebagai kewajiban suatu daerah dalam satu anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah tersebut (Permatasari & Trisnainingsih, 2022). Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 terdapat pengelompokan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti belanja belanja pegawai harian, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangandan belanja tidak terduga. Semakin besar porsi alokasi belanja

tidak langsung, maka semakin kecil porsi alokasi anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat (Lufki & Rizal, 2022)

Salah satu komponen belanja langsung adalah belanja modal yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan memiliki jangka manfaat panjang. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Pembiayaan belanja modal pemerintah harus direncanakan bagaimana terpenuhinya sumber pendapatan daerah, semakin meningkatnya belanja daerah maka semakin besar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang akan dirasakan masyarakat. Menurut Astiti, dkk (2016) banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan mewujudkan infrastruktur dan sarana yang semakin baik. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun	Variabel	Hasil
1.	Fanika et al (2024)	<b>Dependen :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAD berpengaruh positif terhadap</li> </ul>

	<p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PAD</li> <li>2) Belanja Daerah</li> <li>3) Dana Perimbangan</li> </ol>	<p>kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Daerah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>
2. Saputri (2024)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dana Perimbangan</li> <li>2) Belanja Daerah</li> <li>3) Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Belanja Daerah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>
3. Maryanti et al. (2023)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja Keuangan</p> <p><b>Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kemandirian</li> <li>2) Efektivitas PAD</li> <li>3) Belanja Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
4. Doni et al. (2023)	<p><b>Dependen</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Independen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rasio Kemandirian</li> <li>2) Belanja Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja</li> </ul>

		keuangan pemerintah daerah
5. Wiwik et al. (2023)	<p><b>Dependen :</b> Kinerja Keuangan Pemrintah Daerah</p> <p><b>Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan Daerah</li> <li>2) Dana Perimbangan</li> <li>3) Belanja Modal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan daerah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> </ul>
6. Maya et al. (2022)	<p><b>Dependen</b> <i>Local Government Financial Performance</i></p> <p><b>Independen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Regional Original Income</i></li> <li>2) <i>Balance Fund</i></li> <li>3) <i>Capital Expenditure</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regional Original Income</i> berpengaruh positif terhadap <i>Local Government Financial Performance</i></li> <li>• <i>Balance Fund</i> berpengaruh positif terhadap <i>Local Government Financial Performance</i></li> <li>• <i>Capital Expenditure</i> berpengaruh positif terhadap <i>Local Government Financial Performance</i></li> </ul>
7. Mubarak et al. (2022)	<p><b>Dependen</b> <i>Local Government Financial Performance</i></p> <p><b>Independen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Capital Expecdicture</i></li> <li>2) <i>Intergovernmental Revenue</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Capital Expenditure</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>• <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh</li> </ul>



		negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
8. Clarisa et al. (2022)	<b>Dependen</b> Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah <b>Independen</b> 1) Pendapatan Asli Daerah 2) Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
9. Permatasari et al. (2022)	<b>Dependen</b> Kinerja Keuangan Daerah <b>Independen</b> 1) Kemandirian 2) Efektivitas PAD 3) Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah</li> </ul>
10. Ramadhan et al. (2022)	<b>Dependen</b> Kinerja Keuangan Daerah <b>Independen</b> 1) PAD 2) Pengelolaan Belanja Daerah 3) Kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</li> </ul>
11. Anynda et al. (2020)	<b>Dependen</b> Kinerja Keuangan Daerah <b>Independen</b> 1) Rasio kemandirian daerah 2) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>• Pengelolaan belanja daerah berpengaruh</li> </ul>

---

3) Pengelolaan Belanja Daerah	positif terhadap kinerja keuangan daerah
----------------------------------	--

---

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kemandirian daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan yang independen, tanpa bergantung terlalu banyak pada dana transfer dari pemerintah pusat (Permatasari, & Trisnaningsih, 2022). Kemandirian daerah dapat menjadi motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan tanggungjawab anggaran dengan baik (Awani & Hariani, 2021).

Berdasarkan teori keagenan, semakin mandiri suatu daerah maka memiliki tanggung jawab sebagai agen terhadap pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kebijakan fiskalnya sendiri, sehingga tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Sehingga kemandirian daerah dapat menunjukkan komitmen dan tanggungjawab agen yang bertindak untuk kepentingan principal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022) mengungkapkan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu tingkat kemandirian daerah tersebut. Semakin mandiri suatu daerah berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah karena mampu memanfaatkan potensi daerah dengan optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Anynda, N.S, & Hermanto, S.B. (2020) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah merupakan gambaran tergantungnya daerah terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah yang mendukung hubungan positif antara kemandirian dan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan dengan temuan Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022) dan Permatasari & Trisnaningsih, (2022). Oleh sebab itu, rumusan hipotesis yang pertama dinyatakan sebagai berikut :

*H1: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.*

### **2.3.2 Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah**

Efektivitas pendapatan asli daerah merepresentasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan yang telah dibuat dibanding dengan target yang telah diputuskan sesuai dengan potensi daerahnya. Pemerintah daerah masuk kategori berkemampuan realisasi PAD yang efektif apabila rasio efektivitas minimal 1%, semakin besar bertambah efektif (Muzaki & Hapsari, 2022). Apabila pemerintah dapat mengelola dengan baik, pendapatan asli daerah dapat menyongkong pembangunan daerah dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan dana akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Anynda & Hermanto, 2020).

Berdasarkan teori keagenan, efektivitas PAD yang baik dapat memperlihatkan tanggungjawab dan kinerja pemerintah dalam mengelola potensi pendapatan asli daerah dan merealisasikan pendapatan daerah sesuai target yang

ditetapkan. Sehingga efektivitas PAD yang baik dapat menunjukan komitmen dan tanggungjawab agen yang bertindak untuk kepentingan dan kepercayaan principal.

Penelitian yang dilakukan Maryanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah efektivitas pendapatan asli daerah, yang menjadi bagian dari penilaian pengelolaan keuangan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan. Sehingga efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan ditemukan oleh Bilqis, K. H., & Priyono, N. (2023) dan Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, rumusan hipotesis yang kedua dinyatakan sebagai berikut :

*H2 : Efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.*

### **2.3.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan belanja daerah yang baik yang baik dapat memperlihatkan tanggungjawab dan kinerja pemerintah dalam dalam mengelola pengeluaran daerah secara efisien dalam pengalokasian belanja daerah. Agen menggunakan sumber daya secara produktif dalam pengalokasian belanja yang tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kepercayaan principal.

Berdasarkan teori keagenan, Penelitian yang dilakukan oleh Maryanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023), adanya pengelolaan belanja daerah baik dan

tepat sasaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut berarti belanja daerah terdapat pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian Dwigantara & Handayani, (2020) memberikan bukti yang sama bahwa belanja daerah menunjukkan angka positif yang berarti belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

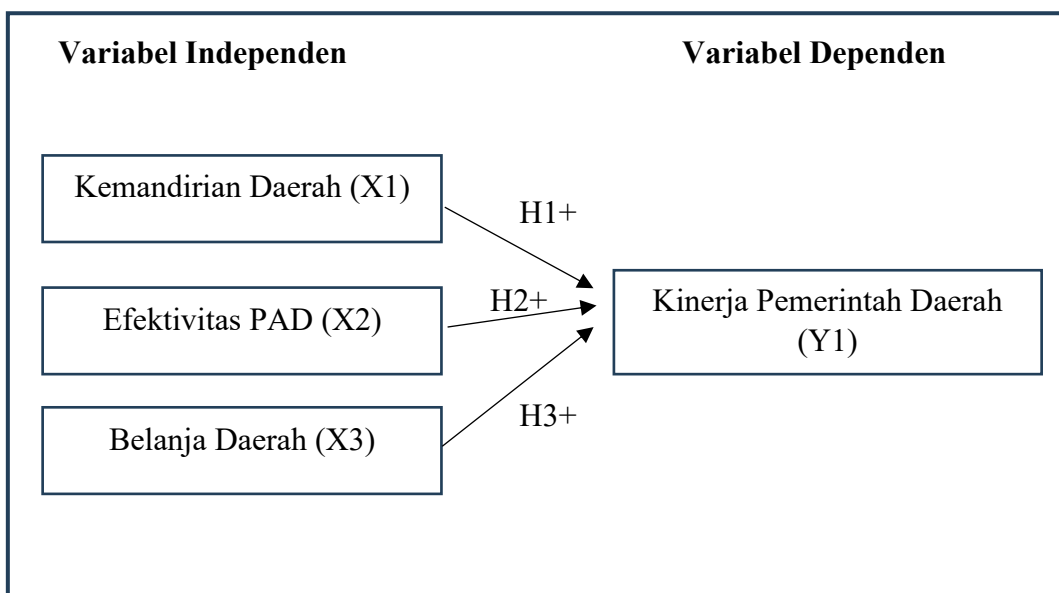
Penelitian yang sama dilakukan oleh Yulia (2016) yang menyatakan bahwa pengalokasian dana belanja daerah yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sehingga belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian yang sejalan dilakukan oleh Rahmalita, A. (2023), Siti, dkk (2024), dan Mubarok (2022). Oleh sebab itu, rumusan hipotesis yang ketiga dinyatakan sebagai berikut:

*H3 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah*

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Dalam menulis penelitian kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



## BAB III

### METEDOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu yang dalam pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk melaksanakan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan ( Sugiyono, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research*. *Explanatory research* memberikan penelitian dalam bentuk hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal) (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan belanja daaerah teradap kinerja pemerintah daerah.

#### 3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

##### 3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi menurut (Sugiyono, 2022) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti dengan tujuan untuk dipelajari kemudian ditarik



kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini merupakan 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah.

### 3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2022). Sugiyono (2022) menyatakan bahwa sampel yang diambil dari sebuah populasi harus benar-benar mampu mewakili populasi. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh sampel yang mampu mewakili dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan (kriteria) tertentu atau seleksi khusus (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang ada sebagai sampel penelitian yaitu pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah sejumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota dalam rentan periode tahun 2020-2024. Data yang diperoleh berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD *audited*) sejumlah 175 data.

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder merupakan sumber data dimana data tersebut tidak diberikan langsung kepada pengumpul data melainkan dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Data yang diambil berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah pada periode 2020-2024 yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Data pada penelitian ini didapatkan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemkeu) melalui situs



(<https://djpk.kemenkeu.go.id>) dan sumber resmi lain yang dapat mendukung penelitian ini.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2022), metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang terdapat pada buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar beserta format pada sebuah laporan yang dapat dipergunakan untuk penelitian. Data pada penelitian ini didapatkan dengan cara mengunduh laporan keuangan dan laporan tahunan 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah pada periode tahun 2019-2023 melalui situs DJPK Kemkeu (<https://djpk.kemenkeu.go.id>).

### 3.5 Variabel dan Indikator

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan independen (X). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Variabel independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan belanja daerah.

#### 3.5.1 Variabel Independen (Y)

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah di Jawa Tengah.

### 1. Kemandirian daerah

Kemandirian daerah dalam sektor keuangan dapat diketahui dengan kemampuan daerah dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan belanja modal serta operasional melalui pendapatan asli daerah (Muh. Zainul & Mega, 2022). Dalam penelitian ini, variabel kemandirian daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian yang digunakan Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022) melalui perbandingan total realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi dana perimbangan.

Rasio Kemandirian Daerah =	$\frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Dana Peimbangan}}$
----------------------------	---

### 2. Efektivitas pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang sah dikelola untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan undang-undang dan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Dalam penelitian ini, variabel efektivitas pendapatan asli daerah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas yang digunakan Anynda, N.S, & Hermanto, S.B. (2020) melalui perbandingan total realisasi penerimaan PAD dengan total target penerimaan PAD. Rasio efektivitas memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana dibanding dengan target yang telah diputuskan sesuai potensi daerah, rasio yang bertambah tinggi berarti semakin efektif (Muh. Zainul & Mega, 2022).

Rasio Efektivitas PAD =	$\frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Target Penerimaan PAD}}$
-------------------------	---

### 3. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang menimbulkan kurangnya ekuitas dana sebagai kewajiban suatu daerah dalam satu anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah tersebut (Permatasari & Trisnaningsih, (2022). Dalam penelitian ini, variabel belanja daerah dapat diukur menggunakan rasio efisiensi yang digunakan Nuraeni, S., Nurhasanah, N., & Kosasih. (2024) melalui perbandingan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pada periode tersebut.

Rasio Belanja Daerah =	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$
------------------------	--

#### 3.5.2 Variabel Dependen (X)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Kinerja pemerintah daerah adalah sebuah penggambaran mengenai capaian program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah mencerminkan pencapaian hasil yang efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mahmudi, 2010).

Dalam penelitian ini, variabel kinerja pemerintah daerah dapat diukur menggunakan rasio efisiensi yang digunakan oleh Anynda, N.S, & Hermanto, S.B. (2020) melalui perbandingan realisasi pengeluaran terhadap total realisasi

penerimaan. Semakin kecil rasio yang dihasilkan maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien, begitu sebaliknya.

$\text{Rasio Kinerja Pemerintah Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$
---

### 3.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis terkait penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda dan Uji Kelayakan Model.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2021) uji statistik deskriptif adalah teknik analisis yang memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Teknik analisis menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghazali (2021) uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk analisis dalam penelitian terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini, terdiri dari empat pengujian antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto kolerasi.

##### 1) Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2021), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji

normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafis. Pengambilan keputusan berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut :

- a. Jika dari hasil penelitian Asymp. Sig (2-tailed)  $> 0,05$  maka data memiliki distribusi normal
- b. Jika dari hasil penelitian Asymp. Sig (2-tailed)  $< 0,05$  maka data memiliki distribusi tidak normal.

Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan analisis grafis adalah sebagai berikut :

- a. Jika data tersebar disekitar garis diagonal dan diikuti oleh arah data sesuai dengan garis diagonal atau grafik histogramnya dengan pola distribusi normal, maka data memiliki distribusi normal
- b. Jika data tersebar menjauhi garis diagonal dan diikuti oleh arah data sesuai dengan garis diagonal atau grafik histogramnya tidak dengan pola distribusi normal, maka data memiliki distribusi tidak normal.

## 2) Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2021), uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik, apabila tidak terdapat kolerasi anta variabel independennya. Pengambilan keputusan dalam uji ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih besar atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10 maka terdapat masalah multikolinieritas pada data.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi, apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Model Heteroskedastisitas dikatakan baik, apabila tidak terdapat heteroskedastisitas.

Cara untuk melakukan uji ini dengan melihat grafik *scatterplot* atau nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Pengambilan keputusan berdasarkan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menunjukkan suatu pola tertentu yang teratur seperti bergelombang atau melebar kemudian menyempit maka data terindikasi heteroskedastisitas.
- b. Jika data menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka data terindikasi tidak terjadi heteroskedistisitas.

Cara lain yang dapat digunakan selain melihat grafik *scatterplot* adalah Uji Park. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan regresi nilai logaritma natural dari residual kuadrat ( $\ln U^2_i$ ). Pengambilan keputusan berdasarkan uji park yaitu jika diperoleh nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $> 0,05$  maka data tidak terjadi heteroskedistisitas.

### 4) Uji Autokolerasi

Menurut Ghozali (2021), uji autokolerasi bertujuan untuk menguji model regresi linier, apakah terdapat kesalahan autokolerasi yaitu kolerasi kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ .



Metode yang digunakan dalam uji ini adalah *Runs Test*. Pengambilan keputusan berdasarkan uji *runs test* adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat gejala autokolerasi
- b. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokolerasi.

### 3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2021) uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen. Persamaan yang menggambarkan model regresi linier berganda dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Kemandirian Pemerintah Daerah

$X_2$  : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_3$  : Belanja Daerah

e : Error

### 3.6.4 Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit Model*)

Uji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model uji signifikan simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### 1) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2021) uji F bertujuan untuk menguji model regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau keseluruhan. Pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai signifikan  $F > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen

### 2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

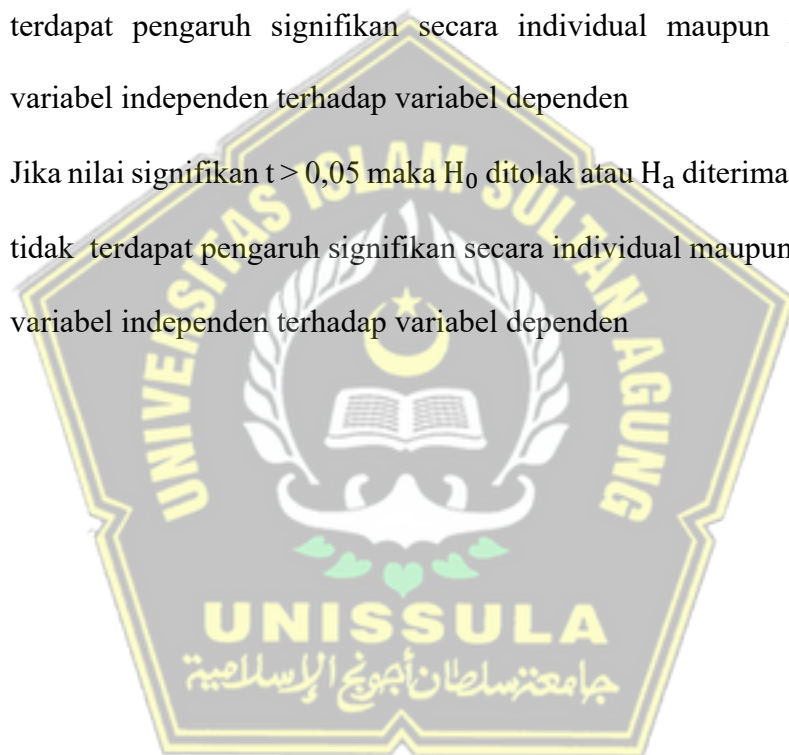
Menurut Ghozali (2021) uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk melakukan pengukuran pada kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Pengambilan keputusan pada uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai ( $R^2$ ) yang dihasilkan kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas
- b. Jika nilai ( $R^2$ ) yang dihasilkan mendekati satu maka informasi yang digunakan dalam melakukan prediksi variabel dependen dapat diberikan oleh variabel independen.

### 3) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2021) uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu atau parsial dalam menjelaskan variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Pengambilan keputusan pada uji statistik t adalah sebagai berikut :

- c. Jika nilai signifikan  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara individual maupun parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen
- d. Jika nilai signifikan  $t > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara individual maupun parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa yang dalam geografis berada di  $5^{\circ}40' - 8^{\circ}30'$  lintang selatan dan  $108^{\circ}30' - 111^{\circ}30'$  bujur timur. Bagian utara Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan laut Jawa dan pada bagian selatan dengan samudera Hindia dan provinsi DIY, bagian barat dengan Jawa Barat, serta bagian timur dengan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menimbulkan munculnya kepentingan strategis dalam distribusi dan transportasi sumber daya perekonomian.

Penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang ada yaitu pemerintah daerah di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota selama periode 2020 s.d. 2024. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling jenuh yaitu teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga diperoleh laporan realisasi anggaran 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah periode 2020 s.d. 2024 sebanyak 175 sampel.

#### 4.2 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Alat bantu analisis yaitu *IBM SPSS Statistics* versi 25.

##### 4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dimaksud untuk menggambarkan data pada masing-masing variabel penelitian dengan rincian nilai minimum, nilai maksimum,

nilai mean, nilai median dan nilai standar deviasi. Hasil uji sebelum dilakukan penghapusan data outlier tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif (1)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah	175	12.41	144.14	31.0961	20.87362
Efektivitas PAD	175	41.05	174.66	104.5536	19.71555
Belanja Daerah	175	4.65	22.94	12.3634	3.67124
Kinerja Keuangan Daerah	175	84.38	117.82	99.9495	4.62195
Valid N (listwise)	175				

Sumber data : diolah (2025)

Terdapat data yang tidak normal, maka dilakukan penghapusan data outlier. Sehingga hasil uji statistik deskriptif setelah penghapusan data outlier adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif (2)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah	164	13.17	60.61	27.5190	10.04914
Efektivitas PAD	164	69.44	174.66	105.4215	17.98762
Belanja Daerah	164	4.65	22.94	12.2013	3.48453
Kinerja Keuangan Daerah	164	84.38	112.27	100.0993	4.17117
Valid N (listwise)	164				

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel diatas dapat diketahui jumlah data (N) yang diolah pada penelitian sebanyak 164 data, sebagai berikut.

(1) Kemandirian Daerah

Hasil menunjukan nilai minimum 13.17 dari data kabupaten wonogiri tahun 2023 dan nilai maksimum 60.61 dari data kota Surakarta tahun 2023 sedangkan untuk nilai mean sebesar 27.5190. Standar deviasi bernilai 10.04914, hal

tersebut berarti lebih kecil dibanding dengan mean atau rata-rata. Sehingga menunjukkan bahwa variabel independen kemandirian daerah memiliki tingkat variasi data yang berada dalam rentang normal.

#### (2) Efektivitas PAD

Hasil menunjukkan nilai minimum 69.44 dari data kabupaten pekalongan tahun 2022 dan nilai maksimum 174.66 dari data dari data kabupaten sragen tahun 2021 sedangkan untuk nilai mean sebesar 105.4215. Standar deviasi bernilai 17.98762, hal tersebut berarti lebih kecil dibanding dengan mean atau rata-rata. Sehingga menunjukkan bahwa variabel independen Efektivitas PAD memiliki tingkat variasi data yang berada dalam rentang normal.

#### (3) Belanja Daerah

Hasil menunjukkan nilai minimum 4.65 dari data kabupaten purbalingga tahun 2024 dan nilai maksimal 22.94 dari data dari data kabupaten boyolali tahun 2022 sedangkan untuk nilai mean sebesar 12.2013. Standar deviasi bernilai 3.48453, hal tersebut berarti lebih kecil dibanding dengan mean atau rata-rata. Sehingga menunjukkan bahwa variabel independen Belanja Daerah memiliki tingkat variasi data yang berada dalam rentang normal.

#### (4) Kinerja Keuangan Daerah

Hasil menunjukkan nilai minimum 84.38 dari data kabupaten magelang tahun 2020 dan nilai maksimal 112.27 dari data dari data kabupaten batang tahun 2024 sedangkan untuk nilai mean sebesar 100.0993. Standar deviasi bernilai 4.17117, hal tersebut berarti lebih kecil dibanding dengan mean atau rata-rata. Sehingga



menunjukkan bahwa variabel dependen Kinerja Keuangan Daerah memiliki tingkat variasi data yang berada dalam rentang normal.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

##### 1) Uji Normalitas

Uji Normalitas data pada penelitian ini menggunakan *Test of Normality Kolomogorov-Smirnov* dengan hasil nilai asymp. sig > 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Berikut tabel hasil uji normalitas dengan *Kolomogorov-Smirnov*.

Tabel 3. 3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			175
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		4.26834697
Most Extreme Differences	Absolute		.076
	Positive		.076
	Negative		-.072
Test Statistic			.076
Asymp. Sig. (2-tailed)			.016 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.252 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.241
		Upper Bound	.263
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0.016 dimana nilai  $< 0,05$  yang berarti data belum berdistribusi normal. Sehingga dilakukan penghapusan data outlier dengan metode box plot sebanyak 11 data. Kemudian dilakukan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* kembali dengan hasil berikut.

Tabel 3. 4 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (2)

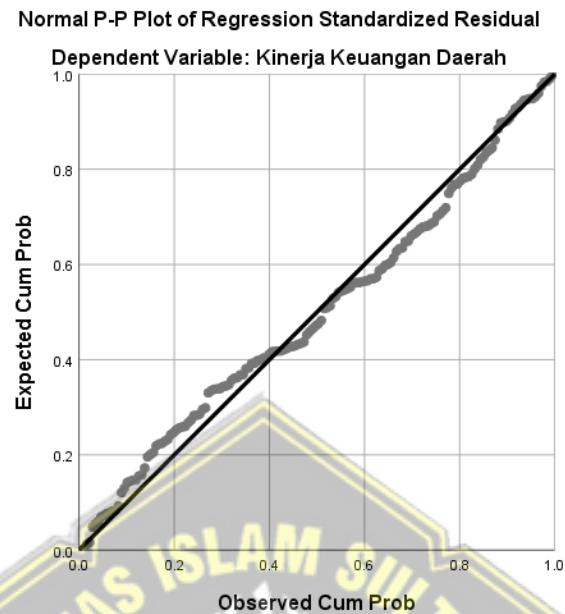
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			164
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.67731383
Most Extreme Differences	Absolute		.061
	Positive		.059
	Negative		-.061
Test Statistic			.061
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 <sup>c,d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.562 <sup>e</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.549
		Upper Bound	.574

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.  
 e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744.

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji normalitas setelah penghapusan outlier nilai asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 dimana nilainya  $> 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Hasil tersebut sejalan dengan uji normalitas dengan normal P-Plot dan grafik histogram pada gambar dibawah ini.

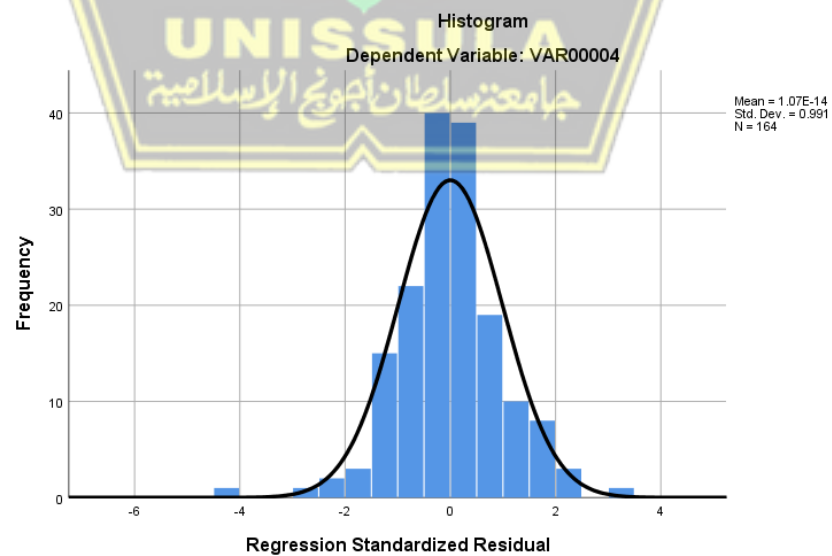
Gambar 3. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot



Sumber data : diolah (2025)

Gambar menunjukkan bahwa grafik P-Plot mempunyai titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 3. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram



Sumber data : diolah (2025)

Gambar menunjukkan bahwa grafik histogram membentuk lonceng dengan titik sumbu tertinggi berada di tengah sehingga dapat dinyatakan bahwa data simetris dan berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat kolerasi antar variabel bebas (independen) dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat multikolinieritas yang dapat dilihat dari nilai nilai VIF < 10,00 dan nilai Tolerance > 0.10. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Kemandirian Daerah	.938	1.066	Tidak terdapat multikolinieritas
	Efektivitas PAD	.994	1.006	Tidak terdapat multikolinieritas
	Belanja Daerah	.941	1.063	Tidak terdapat multikolinieritas

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa variabel independen kemandirian daerah, efektivitas PAD, belanja daerah memperoleh tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Sehingga dapat dinyatakan pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi, apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain

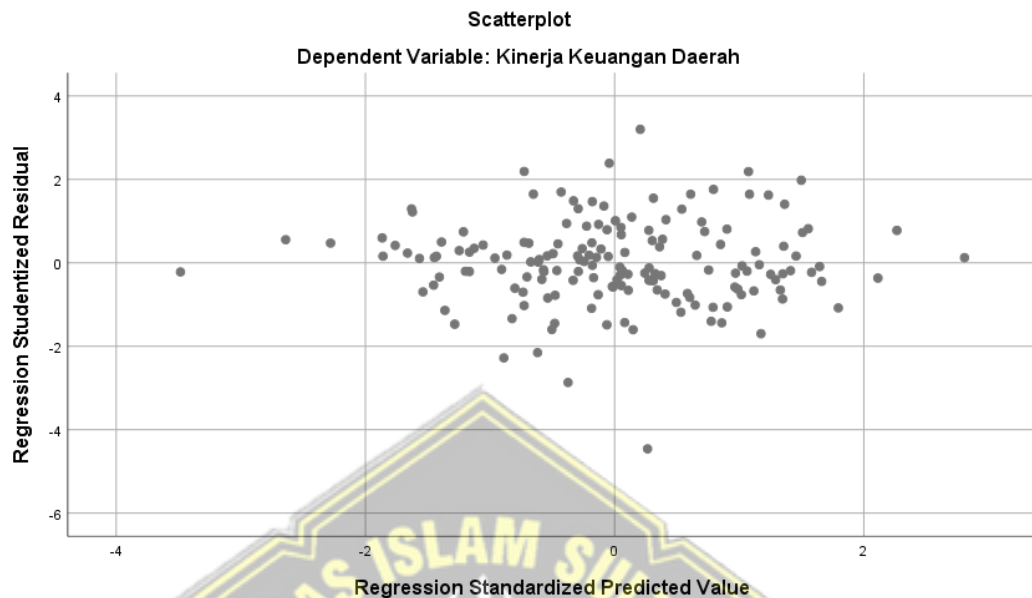
dengan melihat dengan melihat grafik *scatterplot* atau menggunakan uji *Gletser* dengan melakukan regresi nilai absolut residualnya terhadap variabel independennya. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat heteroskedastisitas yang dapat dilihat dari nilai sig. variabel Independen dengan absolut residual  $> 0,05$  pada uji *Gletser*. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Gletser*

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.361	1.347		1.753	.081
Kemandirian Daerah	.004	.020	.014	.176	.860
Efektivitas PAD	-.005	.011	-.035	-.449	.654
Belanja Daerah	.064	.057	.090	1.115	.266
a. Dependent Variable: Abs_RES1					

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas tersebut menunjukkan bahwa variabel independen kemandirian daerah, efektivitas PAD, belanja daerah memperoleh nilai sig. variabel Independen dengan absolut residual  $> 0,05$ . Sehingga dapat dinyatakan pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil tersebut sejalan dengan uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dibawah ini.

Gambar 3. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Grafik *Scatterplot*

Sumber data : diolah (2025)

Gambar menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* tidak ada pola jelas (bergelombang, melebar/menyempit) dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4) Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi digunakan untuk menguji model regresi linier, apakah terdapat kesalahan kolerasi kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  dengan melihat dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test). Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat gejala autokolerasi yang dapat dilihat dari nilai  $dU < d < 4-dU$  pada DW test. Hasil uji autokolerasi disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3. 7 Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.472 <sup>a</sup>	.223	.208	3.71163	1.813
a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Efektivitas PAD, Kemandirian Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah					

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji autokolerasi tersebut menunjukkan bahwa model regresi memperoleh nilai DW sebesar 1,813, yang berada diantara nilai dU sebesar 1,782 dan (4-dU) sebesar 2,218. Sehingga memenuhi kriteria  $dU < d < (4-dU)$  dengan persamaan  $1,782 < 1,813 < 2,218$ . Sehingga dapat dinyatakan pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala autokolerasi.

### 5) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel independen kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah dan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	105.066	2.023	51.936	.000
	Kemandirian Daerah	.024	.030	.057	.432
	Efektivitas PAD	-.091	.016	-.390	.000
	Belanja Daerah	.322	.086	3.743	.000
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah					

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji analisis regresi berganda tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$KKD = 105,066 + 0,024KD - 0,91 EPAD + 0,322 BD + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, dapat dijelaskan bahwa :

- (1) Nilai konstanta sebesar 105,066 berarti jika seluruh variabel independen (kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah) dianggap bernilai 0 atau tidak terdapat perubahan (konstan), maka nilai kinerja keuangan daerah sebesar 105,066.
- (2) Nilai koefisien regresi kemandirian daerah (KD) sebesar positif 0,024 berarti jika setiap kenaikan KD sebesar 1% berbanding lurus dengan nilai kinerja keuangan daerah dengan kenaikan sebesar 0,024 dengan asumsi variabel lain konstan.
- (3) Nilai koefisien regresi efektivitas PAD (EPAD) sebesar negatif 0,091 berarti jika setiap kenaikan EPAD sebesar 1% berbanding terbalik dengan nilai kinerja keuangan daerah dengan penurunan sebesar 0,091 dengan asumsi variabel lain konstan.
- (4) Nilai koefisien regresi belanja daerah (BD) sebesar positif 0,322 berarti jika setiap kenaikan BD sebesar 1% berbanding lurus dengan nilai kinerja keuangan daerah dengan kenaikan sebesar 0,322 dengan asumsi variabel lain konstan.

#### 4.2.3 Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit Model*)

##### 1) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji model regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau keseluruhan. Model regresi memiliki *Goodness of Fit Model* jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau nilai F.hitung  $>$

F.tabel pada uji F, yang berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 9 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	631.786	3	210.595	15.287	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2204.190	160	13.776		
	Total	2835.976	163			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah  
b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Efektivitas PAD, Kemandirian Daerah

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa signifikan variabel Independen dengan variabel dependen sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai F.hitung sebesar 15,287 lebih besar dibanding dengan F.tabel sebesar 2,70 (F.hitung > F.tabel). Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi penelitian ini memiliki *Goodness of Fit Model* yang berarti variabel independen kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk melakukan pengukuran pada kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Hasil uji  $R^2$  disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.472 <sup>a</sup>	.223	.208	3.71163

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Efektivitas PAD, Kemandirian Daerah  
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan tabel uji  $R^2$  tersebut menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,0208 yang berarti bahwa nilai variabel kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan daerah sebesar 20,8% sedangkan sisanya sebesar 79,2% akan dijelaskan oleh variabel lain.

#### 4.2.4 Pengujian Hipotesis

##### 1) Uji T (Uji Parsial)

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu atau parsial dalam menjelaskan variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil uji T disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 11 Hasil Uji T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Keputusan
	B	Std. Error	Beta	t		
1 (Constant)	105.066	2.023		51.936	.000	
Kemandirian Daerah	.024	.030	.057	.788	.432	Ditolak
Efektivitas PAD	-.091	.016	-.390	-5.584	.000	Diterima
Belanja Daerah	.322	.086	.269	3.743	.000	Diterima

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber data : diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji T diatas, dapat dijelaskan bahwa :

##### (1) Hipotesis 1

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,432 > 0,05. Nilai T.hitung sebesar 0,788 lebih kecil dibanding dengan T.tabel sebesar 1,975 (T.hitung < T.tabel). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel

kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ( $H_1$  **ditolak**).

(2) Hipotesis 2

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai T.hitung sebesar 5,584 lebih besar dibanding dengan T.tabel sebesar 1,975 ( $T.hitung > T.tabel$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ( $H_2$  **diterima**).

(3) Hipotesis 3

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai T.hitung sebesar 3,743 lebih besar dibanding dengan T.tabel sebesar 1,975 ( $T.hitung > T.tabel$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ( $H_3$  **diterima**).

#### 4.3 Pembahasan hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah, berikut hasil interpretasinya:

##### 4.3.1 Hubungan kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,432 > 0,05$ . Nilai T.hitung sebesar 0,788 lebih kecil dibanding dengan T.tabel sebesar 1,975 ( $T.hitung < T.tabel$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel

kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ( $H_1$  **ditolak**).

Data rasio kemandirian daerah di pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki rata-rata yang tergolong rendah yaitu 28 % sampai 32% pada rentang tahun 2020-2024. Berdasarkan Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 termasuk dalam kategori kemandirian rendah yang berarti pemerintah daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID). Adanya ketergantungan daerah dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan pemerintah daerah di Jawa Tengah belum bisa menjadi sumber pembiayaan daerah. Rasio kemandirian daerah menjadi gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi maka semakin mandiri daerah.

Hasil berbeda diperoleh dalam penelitian ini, yaitu kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah. Data dari Kota Semarang pada tahun 2024 memperoleh nilai rasio kemandirian tertinggi, namun tidak secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang semakin efisien. Kinerja keuangan daerah diukur dengan seberapa efisien pemerintah daerah mengeluarkan belanja untuk mendapatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini perlu dilakukan pengkajian mengenai seberapa besar biaya yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tersebut. Sehingga tidak terdapat ketimpangan



antara pendapatan asli daerah yang akan ditargetkan dengan biaya untuk memperolehnya.

Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Anynda, N.S, & Hermanto, S.B. (2020) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, semakin tinggi kemandirian daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu sebaliknya semakin rendah kemandirian daerah semakin rendah kinerja keuangan daerah. Namun hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Maryanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

#### **4.3.2 Hubungan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan daerah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai T.hitung sebesar 5,584 lebih besar dibanding dengan T.tabel sebesar 1,975 ( $T.hitung > T.tabel$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (**H<sub>2</sub> diterima**).

Data rasio efektivitas PAD di pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki rata-rata yaitu 99% sampai 123% pada rentang tahun 2020-2024. Berdasarkan Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 termasuk dalam kategori kemandirian sangat efektif. Pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam mewujudkan rencana realisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sesuai potensi daerah. Efektivitas PAD dapat menjadi pemasukan dana yang sangat

potensi untuk membiayai kegiatan dan pembangunan sehingga dapat berpengaruh meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan landasan teori tersebut, semakin tinggi efektivitas PAD maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah.

Hasil berbeda diperoleh dalam penelitian ini, menyatakan hubungan pengaruh negatif yaitu semakin tinggi efektivitas PAD, kinerja keuangan daerah semakin menurun. Hubungan ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang kurang sehat. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti penetapan target PAD yang dibuat rendah, sehingga terlihat efektif dengan tercapainya target namun kontribusi terhadap pembiayaan daerah kecil. Dalam data Kota Blora tahun 2022 memiliki efektivitas PAD yang tinggi, terlihat dari realisasi PAD yang melebihi target yang telah ditetapkan, namun capaian tersebut tidak diimbangi dengan hasil kinerja keuangan yang efisien pada tahun yang sama.

Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Maryanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, Anynda, N.S., & Hermanto, S.B. (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Namun hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Andriani (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

#### **4.3.3 Hubungan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $T_{hitung}$  sebesar 3,743 lebih besar dibanding dengan  $T_{tabel}$

sebesar 1,975 ( $T_{hitung} > T_{tabel}$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (**H<sub>3</sub> diterima**).

Data rasio belanja daerah di pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki rata-rata yaitu 10% sampai 13% pada rentang tahun 2020-2024. Berdasarkan Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 termasuk dalam kategori belanja daerah sangat efisien. Belanja daerah merupakan instrument penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik. Adanya pengelolaan belanja daerah yang baik dan tepat sasaran akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin baik pengelolaan belanja daerah maka semakin baik kinerja keuangan daerah

Hasil sejalan sesuai penelitian bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, semakin baik pengelolaan belanja daerah maka semakin baik kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Andryani (2023) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, Namun hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Anynda, N.S, & Hermanto, S.B. (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah terhadap kinerja daerah. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah, maka **hipotesis 1 ditolak**. Pemerintah daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat sehingga pendapatan asli daerah yang dihasilkan pemerintah daerah di Jawa Tengah belum bisa menjadi sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengakibatkan kemandirian daerah di Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah, maka **hipotesis 2 ditolak**. Hasil menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara efektivitas PAD dan kinerja keuangan daerah, yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang kurang sehat. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti penetapan target PAD yang dibuat rendah, sehingga terlihat efektif dengan tercapainya target namun kontribusi terhadap pembiayaan daerah kecil.
3. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah, maka **hipotesis 3 diterima**. Hasil menunjukkan hubungan searah antara belanja daerah dan kinerja keuangan daerah, yang berarti adanya

pengelolaan belanja daerah baik dan tepat sasaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Semakin baik pengelolaan belanja daerah maka semakin baik kinerja keuangan daerah.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan yang telah di sajikan, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya atau menambah data panel dengan periode yang lebih panjang sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi mengenai upaya meningkatkan kemandirian daerah dengan diversifikasi sumber PAD.

Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi mengenai efektivitas PAD, supaya peningkatan PAD tidak mengorbankan efisiensi belanja sehingga hasil efektivitas PAD berjalan searah dengan kinerja keuangan daerah.

### 3. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang dapat mendorong daerah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan efektivitas dengan memperhatikan efisiensi keuangan daerah.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Berdasarkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* hanya diperoleh 0,208 yang berarti bahwa nilai variabel kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan daerah sebesar 20,8% sedangkan sisanya sebesar 79,2% akan dijelaskan oleh variabel lain.
2. Penelitian yang dilakukan sebatas di wilayah pemerintah daerah di Jawa Tengah yaitu 29 kabupaten dan 6 kota untuk tahun anggaran 2020 s.d. 2024. Sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi untuk daerah lain di Indonesia.

### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini masih ditemukan keterbatasan-keterbatasan baik dalam variabel penelitian, ruang lingkup maupun metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, agenda penelitian mendatang dapat ditujukan terhadap kajian yang lebih luas dan mendalam. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada periode yang lebih panjang maupun pada pemerintah daerah yang lebih beragam sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel penelitian yang dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga penelitian mendatang dapat memberikan dan menambah kontribusi terhadap upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*.
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Azhar, I. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA. *Jurnal Transformasi Administrasi*.
- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bilqis, K. H., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah periode 2015-2020. *Jurnal Economina*.
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universita Diponogoro.
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ganec Swara*.
- Indonesia, K. D. (n.d.). *Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Kemenkeu, D. (n.d.). <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marsono. (2005). *Otonomi Daerah 1945 – 2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Maryanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023). Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabutan/Kota Aceh. *SingKite Journal*.

- Mubarak, M. H., Nasution, A. A., & Kesuma, S. A. (2022). Local Government Financial Performance : The Effect of Capital Expenditure and Intergovernmental Revenue (The Case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*.
- Muzaki, M. Z., & Hapsari, M. T. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 2015-2020. *Sibatik Journal*.
- Nuraeni, S., Nurhasanah, N., & Kosasih. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal. *Gorontalo Accounting Journal*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Permatasari, D. A., & Trisnainingsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Putra, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*.
- Rahmalita, A. (2023). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA SAAT PANDEMI COVID-19.
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Belanja Daerah dan Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Vol.3)*. CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. (n.d.).